

Strategi Kesiapan Kontingen Formed Police Unit Indonesia dalam Menangani Konflik di Sudan: Studi Kasus Misi UNAMID (*United Nations Missions in Darfur*)

Bayu Arswendo¹ Robby Moechammad Taufik² Sulistyanto³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat^{1,2,3}

Email: bayupalembang2009@gmail.com¹ robby.moechammad.taufik@idu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi mengoptimalkan Kontingen FPU Indonesia dalam rangka menangani konflik di Darfur guna mendukung tugas Operasi Perdamaian Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada kemampuan SDM dan dukungan alat peralihan untuk mengoptimalkan Kontingen FPU Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan unsur Divhubinter Polri, Satgas Garbha II FPU UNAMID dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan SDM FPU Indonesia, khususnya dalam aspek penguasaan bahasa asing, kemampuan teknis dan taktis, serta ketahanan fisik dan mental, masih memerlukan peningkatan untuk menghadapi kompleksitas konflik di Darfur. Selain itu, Dukungan materiil/alat peralihan kontingen FPU Indonesia, meskipun secara umum telah memenuhi standar minimum PBB, belum sepenuhnya memadai untuk menghadapi ancaman kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi FPU Indonesia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan SDM, modernisasi peralatan, dan penguatan tata kelola operasional.

Kata Kunci: Strategi, Kesiapan, FPU Indonesia, UNAMID



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Afrika merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap konflik, baik itu konflik antar-etnis maupun konflik bersenjata. Salah satu negara di Afrika yang menarik perhatian dunia internasional adalah Sudan, yang telah mengalami konflik antar-etnis selama 17 tahun. Menurut Putri, C. (2017), Konflik tersebut dipicu oleh tindakan marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Sudan terhadap penduduk Darfur dan persaingan atas sumber daya alam.



Gambar 1. Peta Sudan

Akibat konflik yang berkepanjangan dan dampak merugikan terhadap warga sipil, PBB bekerja sama dengan Uni Afrika, sebuah organisasi regional di Afrika, untuk membentuk misi gabungan yang dikenal sebagai UNAMID. UNAMID resmi dimulai pada 1 Januari 2008 dimana Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut berpartisipasi dalam misi UNAMID.

Pasukan perdamaian Indonesia yang ikut serta berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dalam misi ini berasal dari personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dikenal dengan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) atau disebut FPU Indonesia. *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia adalah satuan tugas Polri yang secara administratif pembinaan berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Namun secara operasional, FPU Indonesia berkedudukan di bawah misi PBB. Satgas FPU Indonesia dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi PBB dan FPU *core duties*. *Three core duties* atau tiga tugas utama FPU adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi. Untuk mampu melaksanakan misi PBB dan FPU *core duties* tersebut SDM FPU Indonesia dipilih melalui seleksi yang ketat dan dilatih sebelum diberangkatkan serta dilengkapi dengan berbagai alat peralatan pendukung tugas.

Dalam misi UNAMID, FPU Indonesia telah berkontribusi secara aktif dalam menciptakan perdamaian di Darfur. FPU Indonesia dengan kekuatan 140 personel, diperkuat dengan SDM yang dipilih melalui pelaksanaan seleksi dan juga dilatih sebelum melaksanakan tugas di Darfur. Melalui proses tersebut *Formed Police Unit Garuda Bhayangkara Indonesia* diharapkan memiliki kemampuan Penanggulangan Huru Hara, *Search and Rescue*, Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan VVIP, Penembak Jitu, Komunikasi Elektronik, Mekanik, Memasak dan juga Kedokteran. FPU terdiri dari Personel Kepolisian, yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk bertindak sebagai unit kohesif yang mampu menyelesaikan tugas-tugas kepolisian yang tidak dapat ditangani oleh Petugas Kepolisian Individu. Namun dalam kasus Misi UNAMID masih terdapat berbagai persoalan. Pada laporan Monitoring dan Evaluasi Satgas Garbha Ii Fpu 11 UNAMID, kemampuan personel dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Perancis, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab masih sangat terbatas. Sebagai satuan yang tergabung bersama satuan dari negara lain dalam misi PBB di Sudan, UNAMID merupakan misi pemeliharaan dan perdamaian dunia yang menggunakan Bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar dalam penugasan. Namun demikian Bahasa Inggris juga dipergunakan diantara personel PBB, sedangkan masyarakat asli Sudan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Kondisi ini menyulitkan personel FPU Indonesia dalam berkomunikasi karena meskipun sudah memperoleh pelatihan bahasa, namun program latihan bahasa asing dilaksanakan dengan waktu yang sangat terbatas hingga belum memberikan peningkatan kemampuan Bahasa asing yang signifikan.

Ketahanan fisik personel FPU Indonesia masih lemah. Dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Satgas Garbha II FPU 11 UNAMID disebutkan, Personel FPU Indonesia menghadapi tantangan berat dilapangan, mengingat harus menghadapi kondisi wilayah di Sudan dengan cuaca yang ekstrim dan tanah yang berlumpur. Dalam kasus Misi UNAMID, banyak anggota yang mengalami sakit malaria dikarenakan banyaknya genangan air yang menjadi sarang nyamuk, dan ancaman ular viper mengintai setiap saat. Pada misi UNAMID sulit diprediksi dimana pertikaian, perkosaan dan kekerasan dapat terjadi kapanpun. Tingginya tingkat persebaran senjata di wilayah basis SLA/AW dan Arab Nomad serta kelompok criminal lain masih memiliki senjata api dan membawanya secara bebas, terutama di wilayah tanpa dengan kehadiran pasukan keamanan yang minim, hal ini menjadi ancaman langsung bagi masyarakat sipil dan juga FPU Indonesia saat melaksanakan *Join Patrol (Water Escort)*, *Special Escort* dan patroli serta pengawalan sehingga diperlukan personel yang mumpuni dalam menghadapi tantangan tugas di Darfur. Kemampuan SDM FPU Indonesia yang belum optimal yang disebabkan oleh kurang sesuainya spesifikasi kemampuan personel hasil rekrutmen dengan kebutuhan dilapangan serta pendidikan dan pelatihan yang terlalu singkat.

Kemampuan SDM FPU Indonesia harus lebih ditingkatkan untuk memperoleh personel yang terlatih dan dapat beroperasi bahkan di lingkungan berisiko tinggi. Melalui perekrutan yang tepat dan pelatihan yang sesuai, kemampuan SDM FPU akan lebih siap dalam melaksanakan tugas-tugas secara mandiri atau mendukung institusi penegak hukum lokal. Peningkatan kemampuan SDM harus dimulai dari pelaksanaan promosi, rekrutment personel hingga sistem diklat pra operasi. Selain SDM, alat peralatan yang mumpuni sangat diperlukan FPU Indonesia dalam mendukung pelaksanaan operasional. Keberadaan kendaraan, alat perlengkapan personel dan alat komunikasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas patroli, pengamanan, maupun kegiatan administrasi. Namun dalam kenyataannya dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Satgas Garbha II FPU 11 UNAMID dijelaskan bahwa FPU Indonesia dihadapkan pada keterbatasan sparepart kendaraan dan alat peralatan serta usia pakai yang sudah tua, mengingat sebagian besar merupakan dukungan pada tahun 2008 saat pelaksanaan misi UNAMID pertama.

FPU Indonesia harus menerima kenyataan dimana kendaraan yang sudah berumur dan terbatasnya spare part untuk perbaikan berpengaruh terhadap mobilitas personel dan kegiatan operasional di lapangan. Mengingat kendaraan merupakan *Major Equipment* dalam COE dan harus selalu dalam kondisi prima. Disamping itu mobilitas yang tinggi dalam kegiatan operasional sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan, terlebih FPU Indonesia telah melaksanakan operasional rutin di Golo TOB yang berada di pegunungan Jabal Marra yang mempunyai medan yang berat untuk dilalui terlebih lagi pada saat musim hujan jalan berlumpur dan berbukit, sangat menghambat dalam pelaksanaan patroli karena kendaraan sering mengalami stak apabila melewati jalan yang berlumpur dan berbatu. Selain itu jaringan internet yang masih belum terpasang di Garuda Camp Golo dan saat ini masih menumpang di UN *office* berpengaruh terhadap kecepatan menerima task order dan pengiriman laporan baik ke UNAMID maupun kepada Divhubinter Mabes Polri. Oleh karena itu, dukungan alat peralatan harus lebih ditingkatkan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas FPU Indonesia. Melalui pengadaan alat peralatan baru yang lebih modern dan distribusi logistic yang tepat, FPU Indonesia akan lebih siap dalam melaksanakan tugas-tugas secara mandiri atau mendukung institusi penegak hukum lokal. Kontingen FPU Indonesia memerlukan dukungan peralatan yang baru dan modernt baik itu berupa kendaraan, senjata internet, maupun peralatan, pribadi personel seperti rompi anti peluru dan lain-lain.

Untuk membangun kesiapan FPU Indonesia dalam menangani konflik di Sudan memerlukan strategi realistis dengan upaya yang menyeluruh dan tepat sasaran. Keberhasilan FPU Indonesia dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan tugas dalam melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum dan mendukung kegiatan kepolisian di daerah misi. Oleh karenanya sasaran dari strategi tersebut adalah untuk membangun kesiapan FPU Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas dalam misi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori strategi dari Lykke (1989) yang menyatakan bahwa strategi merupakan formulasi antara *Ends* (sesuatu yang ingin dicapai), *Means* (sumber daya yang dimiliki), dan *Ways* (cara penggunaan sumber daya). Adapun sumber daya yang dapat dipergunakan dalam hal ini adalah SDM Polri dan alat peralatan. Sedangkan yang menjadi cara penggunaan sumber daya diantaranya penyempurnaan dalam perekrutan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan pemanfaatan perkembangan teknologi (modernisasi), pengadaan dan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selama ini, hasil evaluasi pelaksanaan tugas misi-misi UNAMID menjadi dasar dalam upaya membangun kesiapan FPU Indonesia. Namun demikian perkembangan kemajuan kesiapan FPU Indonesia belum dapat dirasakan secara signifikan. Kendala-kendala di lapangan masih terus terjadi khususnya berkaitan dengan kemampuan personel dan dukungan alat peralatan. Hal ini terlihat dari adanya persoalan yang sama pada penugasan

misi-misi UNAMID. Dalam rangka mengatasi pokok-pokok persoalan di atas, maka diperlukan solusi berupa adanya perumusan kebijakan, serta langkah-langkah yang cerdas dan aplikatif dalam rangka mengoptimalkan kesiapan Kontingen FPU Indonesia dalam Menangani Konflik di Sudan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada kasus Misi UNAMID, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan memfokuskannya pada aspek SDM, alat peralatan dan strategi kesiapan Kontingen FPU Indonesia menangani konflik di Darfur yang disusun dalam tesis berjudul: Strategi Kesiapan Kontingen FPU Indonesia dalam Menangani Konflik di Sudan. Studi Kasus Misi UNAMID (*United Nations Missions in Darfur*).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif untuk menganalisis strategi kesiapan Kontingen Formed Police Unit (FPU) Indonesia dalam menangani konflik di Sudan pada misi UNAMID. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kesiapan kontingen yang melibatkan aspek sumber daya manusia, dukungan alat peralatan, serta tata kelola operasional dalam konteks operasi perdamaian dunia. Penelitian dilaksanakan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Pusat Pelatihan Multifungsi Cikeas sebagai lokasi utama yang berkaitan langsung dengan proses rekrutmen, pelatihan, serta kesiapan operasional Kontingen FPU Indonesia. Subjek penelitian terdiri dari unsur pimpinan Divisi Hubungan Internasional Polri, personel Satgas Garbha II FPU UNAMID, serta pihak terkait yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan misi perdamaian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan keterlibatan langsung dalam penugasan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat Pelatihan Multifungsi Cikeas. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kesiapan Kontingen Formed Police Unit (FPU) Indonesia dalam menangani konflik di Darfur dilihat dari aspek kemampuan sumber daya manusia, dukungan alat peralatan, serta strategi kesiapan operasional. Pada aspek kemampuan sumber daya manusia, temuan penelitian menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing personel masih terbatas, khususnya bahasa Arab, Inggris, dan Prancis yang digunakan dalam pelaksanaan misi. Personel telah memperoleh pelatihan bahasa, namun durasi pelatihan relatif singkat sehingga peningkatan kemampuan belum optimal. Kemampuan teknis dan taktis personel menunjukkan bahwa sebagian besar personel telah memiliki keterampilan dasar pengendalian massa, patroli, dan perlindungan sipil, tetapi kemampuan menghadapi ancaman kompleks seperti operasi malam, ancaman improvised explosive device (IED), dan situasi konflik asimetris masih memerlukan penguatan. Ketahanan fisik dan mental personel menunjukkan adanya tantangan akibat kondisi iklim ekstrem, tekanan psikologis, serta risiko kesehatan di daerah operasi.

Tabel 1. Human Resource Capability FPU Personnel

No	Aspek Kemampuan	Kondisi Temuan
1	Bahasa Asing	Terbatas pada Tingkat operasional dasar
2	Kemampuan Teknis	Memadai pada tugas dasar kepolisian
3	Kemampuan Taktis	Memerlukan peningkatan pada ancaman kompleks
4	Ketahanan Fisik dan Mental	Menghadapi tantangan kondisi ekstrem

Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia FPU Indonesia berada pada kategori cukup dengan kebutuhan peningkatan terutama pada kemampuan bahasa asing dan kemampuan taktis lanjutan. Pada aspek dukungan alat peralatan, hasil penelitian

menunjukkan bahwa materiil kontingen secara umum telah memenuhi standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional menghadapi ancaman kontemporer. Kendaraan operasional tersedia tetapi menghadapi keterbatasan usia pakai dan ketersediaan suku cadang. Sistem komunikasi masih didominasi perangkat konvensional sehingga koordinasi operasional memiliki keterbatasan. Peralatan operasi malam, dukungan intelijen berbasis teknologi, serta fasilitas medis lapangan menunjukkan keterbatasan.

Tabel 2. Equipment Support Condition of Indonesian FPU Contingent

No	Komponen Peralatan	Kondisi Temuan
1	Kendaraan Operasional	Tersedia Namun keterbatasan sparepart
2	Sistem Komunikasi	Masih konvensional
3	Peralatan Operasi Malam	Terbatas
4	Dukungan Medis Lapangan	Belum optimal
5	Teknologi ISR	terbatas

Tabel 2 menunjukkan bahwa dukungan alat peralatan berada pada kondisi cukup dan memerlukan modernisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan logistik dan pemeliharaan peralatan berdampak pada kesiapan operasional kontingen. Beberapa kendaraan mengalami downtime operasional, sementara proses pengadaan dan distribusi suku cadang membutuhkan waktu relatif lama. Kondisi ini berpengaruh terhadap mobilitas patroli dan pelaksanaan pengawalan di wilayah berisiko tinggi. Pada aspek strategi kesiapan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan kontingen dibangun melalui proses rekrutmen selektif, pelatihan pra-penugasan, serta pemeliharaan materiil yang tersedia. Pelatihan mencakup kemampuan teknis kepolisian, simulasi operasi, serta pembekalan dasar bahasa asing. Selain itu, kerja sama pelatihan dengan kontingen negara lain telah dilakukan dalam bentuk latihan bersama dan pertukaran pengalaman operasional.

Tabel 3. Equipment Support Condition of Indonesian FPU Contingent

No	Komponen Strategi	Kondisi Temuan
1	Rekrutmen	Dilaksanakan secara selektif
2	Pelatihan Pra – Tugas	Dilaksanakan namun durasi terbatas
3	Modernisasi Peralatan	Bertahap
4	Kerjasama Internasional	Telah dilaksanakan
5	Tata Kelola Operasional	Mengacu standar PBB

Tabel 3 menunjukkan bahwa strategi kesiapan telah dilaksanakan secara sistematis, namun masih terdapat kebutuhan peningkatan pada pelatihan lanjutan, modernisasi peralatan, dan integrasi sistem kesiapan. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesiapan Kontingen FPU Indonesia berada pada kondisi operasional memadai untuk menjalankan mandat dasar misi perdamaian. Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kebutuhan penguatan pada kemampuan bahasa asing, peningkatan kemampuan teknis dan taktis lanjutan, modernisasi peralatan operasional, serta penguatan sistem logistik dan pemeliharaan untuk mendukung kesiapan kontingen dalam menghadapi dinamika konflik di Darfur.

Discussion

Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian secara analitis dengan menghubungkan temuan empiris, kerangka teori strategi dan kesiapan, regulasi yang relevan, serta

perbandingan dengan penelitian terdahulu. Pembahasan disusun untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana strategi kesiapan Kontingen FPU Indonesia dalam menangani konflik di Darfur dapat dioptimalkan.

Pengolahan Data dan Temuan Penelitian (*What/How Element*)

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah direduksi dan dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama kesiapan, yaitu: (1) kemampuan sumber daya manusia, (2) dukungan alat peralatan, dan (3) tata kelola operasional. Kategorisasi dilakukan melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dominan yang memengaruhi kesiapan kontingen

Tabel 4. Integrated Readiness Dimension of Indonesian FPU Contigent

Dimensi	Indikator Utama	Kondisi Aktual	Implikasi Operasional
SDM	Bahasa, teknis – taktis, fisik – mental	Cukup, belum merata	Hambatan Komunikasi dan respon taktis
Peralatan	Kendaraan, komunikasi, NVG, medis	Standar minimum PBB	Keterbatasan mobilitas dan night operation
Tata Kelola	SOP, Koordinasi, Pelatihan	Mengacu standar PBB	Interoperabilitas belum optimal

Tabel 4 menunjukkan bahwa kesiapan kontingen berada pada tingkat operasional dasar, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas ancaman kontemporer. Pengolahan data menunjukkan keterkaitan langsung antara keterbatasan bahasa asing dan efektivitas koordinasi lapangan, serta antara keterbatasan teknologi ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) dengan risiko operasional patroli malam. Temuan ini merupakan hasil sintesis data terstruktur, bukan data mentah.

Keterkaitan Temuan dengan Konsep Teoretis dan Regulasi (*Why Element*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan kontingen dapat dianalisis melalui teori strategi Lykke yang menekankan keseimbangan antara Ends (tujuan), Means (sumber daya), dan Ways (cara penggunaan sumber daya). Dalam konteks ini, tujuan (ends) adalah keberhasilan pelaksanaan mandat perlindungan sipil dan pemeliharaan ketertiban. Means mencakup kualitas SDM dan dukungan materiil. Ways mencakup sistem pelatihan, modernisasi peralatan, dan tata kelola operasional. Temuan menunjukkan bahwa unsur means belum sepenuhnya selaras dengan kompleksitas ends. Ketidakseimbangan ini menjelaskan mengapa efektivitas operasional belum maksimal. Secara konseptual, kesiapan menurut teori kesiapan organisasi menuntut keselarasan antara kapasitas individu dan dukungan sistemik. Ketika dukungan peralatan terbatas pada standar minimum, maka kesiapan hanya berada pada level compliance, bukan adaptive readiness. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan partisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Selain itu, mandat PBB dalam UNAMID menekankan perlindungan sipil (Protection of Civilians/PoC) dan stabilisasi keamanan. Fakta empiris menunjukkan bahwa keterbatasan night vision devices, sistem komunikasi terenkripsi, dan dukungan medis lapangan berpengaruh terhadap optimalisasi mandat tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif dan kapasitas aktual. Pada tingkat operasional, konflik Darfur memiliki karakteristik ancaman asimetris, mobilitas tinggi milisi, serta kondisi geografis ekstrem. Dalam pendekatan keamanan kontemporer, kesiapan menghadapi ancaman asimetris memerlukan integrasi teknologi ISR, interoperabilitas komunikasi, serta pelatihan berbasis skenario nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komponen ini masih dalam tahap penguatan bertahap.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu (*What Else Element*)

Penelitian terdahulu menekankan peran FPU Indonesia dalam membangun stabilitas dan reputasi internasional Indonesia. Kajian sebelumnya menyimpulkan bahwa FPU Indonesia memiliki kontribusi positif dalam menjaga ketertiban umum dan membangun kepercayaan masyarakat lokal. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil tersebut dalam hal pengakuan terhadap profesionalisme dasar dan komitmen operasional kontingen. Namun demikian, penelitian ini menemukan dimensi tambahan yang belum dibahas secara mendalam pada studi sebelumnya, yaitu integrasi antara kesiapan SDM dan modernisasi materiil dalam satu kerangka strategi. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek peran diplomatik atau perspektif hukum internasional, sementara penelitian ini menganalisis kesiapan sebagai sistem strategis terpadu. Temuan mengenai kesenjangan teknologi, keterbatasan ISR, dan pengaruhnya terhadap efektivitas patroli malam menunjukkan aspek yang lebih operasional dibanding penelitian sebelumnya. Dengan demikian, terdapat perluasan perspektif dari sekadar evaluasi kontribusi menjadi analisis struktural kesiapan.

Kebaruan (*Novelty*)

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi Model Kesiapan Terintegrasi FPU Indonesia, yang menggabungkan tiga dimensi utama—SDM, peralatan, dan tata kelola—dalam satu kerangka strategi berbasis teori Ends-Means-Ways. Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi teori strategi militer ke dalam konteks kesiapan kepolisian internasional. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan prioritas strategis berbasis temuan lapangan, yaitu: penguatan bahasa operasional, peningkatan kemampuan taktis berbasis ancaman asimetris, modernisasi komunikasi terenkripsi, serta penguatan sistem logistik dan pemeliharaan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjawab perumusan masalah mengenai strategi kesiapan kontingen FPU Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam kajian strategi keamanan serta rekomendasi praktis untuk peningkatan kesiapan operasi perdamaian di masa mendatang.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Kontingen Formed Police Unit (FPU) Indonesia dalam menangani konflik di Darfur pada misi UNAMID berada pada tingkat operasional yang memadai untuk menjalankan mandat dasar pemeliharaan perdamaian, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas ancaman kontemporer. Kesiapan sumber daya manusia masih menghadapi keterbatasan pada aspek penguasaan bahasa asing, penguatan kemampuan teknis dan taktis lanjutan, serta ketahanan fisik dan mental dalam menghadapi lingkungan ekstrem. Dukungan alat peralatan secara umum telah memenuhi standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi masih terdapat kesenjangan pada aspek teknologi komunikasi, kemampuan operasi malam, dukungan intelijen berbasis teknologi, dan sistem logistik pemeliharaan. Analisis menunjukkan bahwa optimalisasi kesiapan memerlukan integrasi antara penguatan kapasitas SDM, modernisasi materiil, dan penyempurnaan tata kelola operasional dalam satu kerangka strategi yang seimbang antara tujuan, sumber daya, dan cara penggunaannya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep Kesiapan Terintegrasi FPU yang menempatkan kesiapan sebagai sistem strategis multidimensional yang saling berkaitan antara faktor manusia, teknologi, dan manajemen operasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup studi kasus yang berfokus pada satu misi serta pendekatan kualitatif yang tidak mengukur kesiapan secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan berbasis indikator kuantitatif, memperluas objek penelitian pada misi perdamaian lainnya,

serta mengkaji pengaruh modernisasi teknologi terhadap efektivitas operasional kontingen secara lebih spesifik

BIBLIOGRAPHY

- Bangsawan, Z. A. (2023). Kepentingan Indonesia melalui Formed Police Unit (FPU) 11 Indonesia pada konflik Darfur, Sudan (2019–2020). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 145–160.
- Bellamy, A. J., & Hunt, C. T. (2015). Twenty-first century UN peace operations: Protection, force and the changing security environment. *International Affairs*, 91(6), 1277–1298. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12417>
- Bove, V., & Ruggeri, A. (2016). Kinds of blue: Diversity in UN peacekeeping missions and civilian protection. *British Journal of Political Science*, 46(3), 681–700. <https://doi.org/10.1017/S000712341400033X>
- Coleman, K. P. (2017). Peacekeeping and peace enforcement in Africa: The evolving role of the United Nations. *African Security*, 10(2), 97–119. <https://doi.org/10.1080/19392206.2017.1308312>
- Karlsrud, J. (2019). From liberal peacebuilding to stabilization and counterterrorism. *International Peacekeeping*, 26(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1502040>
- Lykke, A. F. (1989). *Toward an understanding of military strategy: Theory and application*. U.S. Army War College.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan.
- Reynaldi, E. S. (2024). Peranan Formed Police Unit (FPU) Indonesia sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membangun perdamaian di Darfur, Sudan (2008–2016). *Jurnal Studi Keamanan Internasional*, 6(1), 55–72.
- Rianto, A. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(3), 201–214.
- Ruggeri, A., Dorussen, H., & Gizelis, T.-I. (2018). On the frontline every day? Subnational deployment of United Nations peacekeepers. *British Journal of Political Science*, 48(4), 1005–1025. <https://doi.org/10.1017/S000712341600017X>
- Slameto. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- United Nations Security Council. (2007). *Resolution 1769 (2007) on the establishment of the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)*.
- United Nations. (2018). *United Nations peacekeeping operations principles and guidelines*. United Nations Department of Peace Operations.
- Winardi, J. (2002). *Motivasi dan pemotivasian dalam manajemen*. Raja Grafindo Persada.
- Zartman, I. W. (2019). Preventive diplomacy and peacekeeping in Africa. *Global Governance*, 25(1), 27–44. <https://doi.org/10.1163/19426720-02501003>